

Rekomendasi BPK Diminta Diperhatikan



GEMA DPRD GROBOGAN



GROBOGAN - DPRD Kabupaten Grobogan meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rekomendasi atau masukan tersebut berguna untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD dari PKB, Nurwibowo usai acara pembicaraan tingkat I tahap Kesatu terkait penjelasan Bupati Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2015. Acara dihadiri para ketua SKPD, FKPD, dan pimpinan BUMD se-Kabupaten Grobogan.

"Intinya, ada beberapa masukan dari BPK yang harus ditindaklanjuti

bupati. Secara keseluruhan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 sudah bagus. Hanya perlu ditingkatkan kembali baik secara administrasi maupun fisik dengan menindaklanjuti masukan-masukan tersebut," ujar dia, belum lama ini.

Wujud Tanggung Jawab

Pada kesempatan tersebut, Bupati Grobogan Sri Sumarni menjelaskan laporannya di hadapan para tamu undangan dan anggota DPRD.

Menurut dia, laporan keuangan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah dan melaksanakan operasional pemerin-

tahan. Hal itu menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan yang harus disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

"Perlu kami sampaikan, laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2015 telah kami laporkan kepada BPK RI perwakilan Provinsi Jateng pada 28 Maret 2016 lalu. BPK RI telah mengaudit pendahuluan selama 30 hari, yakni mulai 25 Januari 2016-24 Februari 2016. Selanjutnya mulai 31 Maret 2016, telah dilakukan pemeriksaan yang lebih terperinci selama 35 hari dan baru akan selesai pada 4 Mei 2016 mendatang," ujar Sri Sumarni.

Dalam acara tersebut, bupati menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan per-



SM/Zulkifli Z Fahmi

SAMPAIKAN LAPORAN: Bupati Sri Sumarni menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 dalam acara pembicaraan tingkat I tahap Kesatu di hadapan anggota DPRD Grobogan. (74)

ubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LE),

neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (zul-74)